

IKHTISAR EKSEKUTIF

1. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Berdasarkan pengertian diatas, maka visi kabupaten cianjur 2016-2021 adalah :

“CIANJUR LEBIH MAJU DAN AGAMIS”

Secara filosofis visi tersebut dapat dimaknai sebagai berikut:

Lebih maju : pembangunan akan terus ditingkatkan dengan semangat kemandirian, penuh inovasi dan profesionalitas birokrasi dalam penyelenggaraan pembangunan di semua bidang baik dalam bidang pemerintahan, maupun bidang infrastruktur, Pendidikan, kesehatan dan ekonomi sebagai upaya mensejahterakan masyarakat secara berkelanjutan.

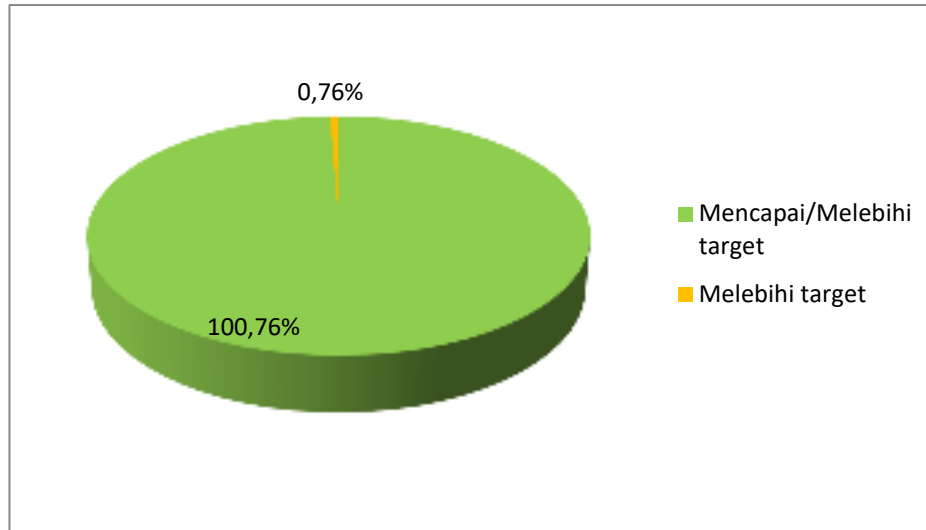
Agamis : pembangunan manusia yang diselenggarakan berlandaskan nilai-nilai akhlakul karimah sebagai penunjang utama bagi keberhasilan pembangunan di berbagai bidang.

2. Misi

Misi pembangunan jangka menengah kabupaten cianjur 2016-2021 selama lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mencapai visi, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
- b. Meningkatkan pembangunan keagamaan.
- c. Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang Pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

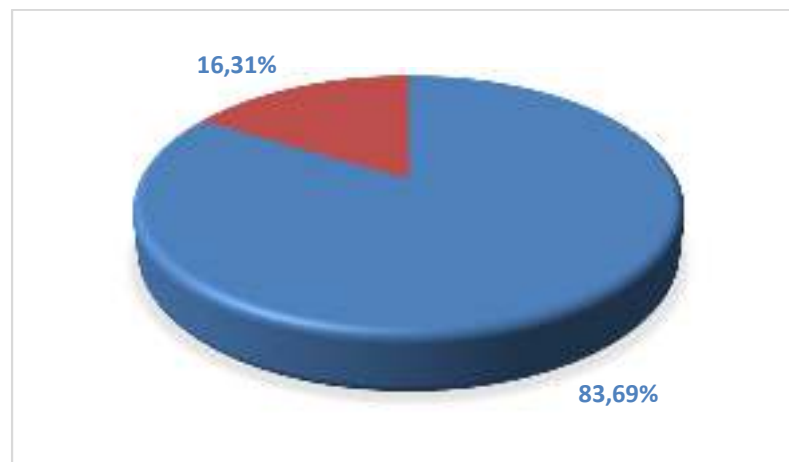
Pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur dapat dilihat dari realisasi capaian pendapatan berdasarkan target pendapatan daerah yang telah ditentukan, capaian pendapatan 2019 dari sebelas jenis pajak secara keseluruhan disajikan pada gambar 1.1 :



Gambar 1.1

Pada gambar 1.1 dapat dilihat persentase realisasi pencapaian target pendapatan Dari 11 jenis pajak sebanyak 100,76% melebihi target, Namun demikian jika ditambahkan penerimaan lain-lain yang sah (denda pajak) capaiannya sebesar 101,84%.

Sedangkan capaian pendapatan 2019 dari sektor Retribusi Daerah secara keseluruhan disajikan pada gambar 1.2 :



Gambar 1.2

Pada gambar 1.2 dapat dilihat persentase realisasi pencapaian target pendapatan dari sektor retribusi daerah sebanyak 83,69% atau kekurangannya sebanyak 16,31 % dari target yang telah ditentukan.

Permasalahan tiap jenis pajak yang tidak mencapai target akan dijelaskan pada Bab berikutnya.

Penilaian terhadap realisasi kinerja digunakan skala pengukuran ordinal yang dibuat dengan kategori asumsi pada table 1.1.

Tabel 1.1
Skala Ordinal

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Nilai 85 s/d 100	Baik
2	Nilai 70 s/d < 85	Cukup
3	Nilai 55 s/d < 70	Sedang
4	Nilai < 55	Kurang

Pada tabel 1.1 digambarkan tolok ukur penilaian terhadap realisasi pencapaian target masing-masing jenis pajak, rincian serta penjabarannya akan dijelaskan pada Bab berikutnya.

Strategi yang ditempuh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, terutama akan mengintensifkan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil, sehingga seluruh kegiatan yang dilakukan dapat menghasilkan kinerja yang mengarah kepada pencapaian Visi dan Misi Badan Pengelolaan Daerah Kabupaten Cianjur.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT bahwasannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 telah kami susun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) kami susun sebagai media dalam menyampaikan informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya peningkatan kinerja yang diharapkan dan telah ditetapkan pada tahun 2019.

Disamping itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai tolok ukur tingkat keberhasilan dalam menerapkan kebijakan-kebijakan terhadap berbagai program kerja yang telah direncanakan dan sekaligus sebagai langkah perbaikan atas berbagai kekurangan dan kelemahan untuk dapat terus ditingkatkan pencapaiannya.

Kami sangat menyadari bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Tahun 2019 dalam perjalanannya terdapat beberapa kendala yang kami hadapi, namun dengan segala daya dan upaya kami dapat mencapai sasaran dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah kami laksanakan, meskipun demikian kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan. Terutama dalam capaian pendapatan pajak daerah, secara keseluruhan dapat mencapai sasaran namun secara terinci ada beberapa pendapatan pajak yang belum mencapai sasaran.

Kami berharap laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi, kajian dan referensi sehingga kedepan kami dapat mewujudkan capaian kinerja yang diamanahkan kepada kami dengan hasil capaian yang maksimal, Amin.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2019 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat khususnya bagi Badan pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur dalam upaya mewujudkan Good Governance dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Cianjur, 12 Februari 2020

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah,
Kabupaten Cianjur,

KOMARUDIN, S.Sos, M.Si
NIP. 19720415 199303 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
Ikhtisar Eksekutif	i
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan	2
C. Isu Strategis	4
D. Dasar Hukum	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis	7
B. Rencana Kinerja Tahun 2019	8
C. Perjanjian kinerja Tahun 2019	12
D. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	14
E. Indikator Kinerja Utama	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Permasalahan dan Pemecahan	24
C. Realisasi Anggaran	31
D. Akuntabilitas Keuangan	33
BAB IV PENUTUP	35
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
- Lampiran 1 : SOP Penyusunan LKJIP	
- Lampiran 2 : Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
- Lampiran 3 : Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019	

A. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur adalah salah satu unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur.

Pencapaian realialisasi Pendapatan dari yang ditargetkan dapat dijadikan sebagai salah satu Tolok ukur keberhasilan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, Realisasi pendapatan dimaksud terdiri dari beberapa sektor pajak meliputi *Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Bab II Pasal 2), Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menjadi Pajak Daerah yang pengelolaannya merupakan kewenangan Kabupaten, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada tahun 2011 sudah dikelola dan dipungut oleh Pemerintah Daerah sedangkan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) pengelolaannya baru dilimpahkan pada awal tahun 2014 dan telah menjadi kewenangan daerah.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan

1. Kedudukan

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 79 tahun 2016 Bab II bagian pertama pasal 2 Ayat (1) dijelaskan bahwa badan Merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan Bidang keuangan, Pada Ayat (2) dijelaskan bahwa Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas

Pada BAB II bagian Kedua Pasal 3 Ayat (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan.

3. Fungsi

Seperti yang diatur di dalam pasal 3 ayat (2) Bahwa Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan Badan di bidang perencanaan, pelaksanaan, Pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan;
- b. Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan;
- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan.
 2. Subbagian Keuangan.
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, membawahkan :
 1. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan.
 2. Subbidang Perhitungan, Penilaian dan Penetapan.
 3. Subbidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain.
- d. Bidang PBB dan BPHTB, membawahkan :
 1. Subbidang Pendaftaran dan Verifikasi.
 2. Subbidang Pendataan dan Penilaian.
 3. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi.
- e. Bidang Penagihan Pajak Daerah, membawahkan :
 1. Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan.
 2. Subbidang Pengaduan dan Penatausahaan Piutang.
 3. Subbidang Penertiban dan Penagihan.
- f. UPTB.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 49 Pegawai Negeri Sipil (PNS), terdiri dari :

- a. Jabatan Struktural : 17 Orang
- b. Staf / PNS : 32 Orang
- c. Honorer : 7 Orang

Adapun komposisi pegawai pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut:

1. Jenis Kepegawaian :

Pegawai menurut jenis kepegawaian terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 49 orang, dan Pegawai Harian /Kontrak Kerja sebanyak 7 orang.

2. Jenis Kelamin :

Kemudian dari sejumlah Pegawai itu sebanyak 40 orang Laki-laki dan 9 Orang Perempuan.

3. Pangkat / Golongan :

Golongan IV sebanyak 4 orang, golongan III 35 orang, dan golongan II sebanyak 10 orang.

C. Isu Strategis Tahun 2019

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam menjalankan Tugas dan fungsi Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur karena dampaknya yang signifikan khususnya bagi Pencapaian kinerja yang telah ditargetkan di sub sektor pendapatan daerah khususnya sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah diperlukan strategi pembangunan yang dijabarkan kedalam kebijakan, program dan kegiatan. Yang dimaksud dengan Kebijakan, Program, dan Kegiatan adalah sebagai berikut:

- a) Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mempertajam makna strategi

dan menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan dalam suatu arah yang mendukung strategi.

- b) Program adalah merupakan penjabaran tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kegiatan.
- c) Kegiatan adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program.

Pada tahun 2019, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kinerja sumber daya aparatur Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah;
- 2) Pada umumnya bidang usaha masyarakat kabupaten Cianjur masih didominasi usaha pertanian tradisional sehingga penggalan sumber pendapatan daerah dari sektor pertanian tidak dapat digali lebih jauh, oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk merangsang tumbuhnya sumber-sumber pendapatan asli daerah dari sektor Pajak daerah lainnya agar pembiayaan pembangunan dapat didukung dari pengelolaan pendapatan daerah yang ada secara lebih optimal.
- 3) Memberikan kesempatan kepada setiap aparatur untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian;
- 4) Membentuk tim intensifikasi PBB dan BPHTB;
- 5) Revitalisasi aset daerah;
- 6) Membentuk tim pengkaji pengembangan potensi pajak daerah;
- 7) Pembangunan dan pengembangan pelayanan.

Sementara itu program-program yang dilaksanakan pada tahun 2019, adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Perencanaan dan Penganggaran
7. Program Peningkatan Pendapatan Daerah

D. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2019 mengacu kepada :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
3. PERPRES 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. PERMENPAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dengan diberlakukannya Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk dijabarkan secara rutin sampai kepada pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karenanya seluruh jajaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis merupakan kebutuhan nyata untuk menghadapi persoalan yang dihadapi maupun untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi.

A. Rencana Strategis

Rencana strategis tahun 2019 adalah langkah-langkah yang dipandang sangat tepat yang akan dilaksanakan selama tahun 2019 untuk mencapai sasaran dan atau target kinerja yang diinginkan dan telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2019 sebagai target kinerja tahunan menuju target kinerja jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2021 yang dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan, dalam upaya mewujudkan sasaran dan target kinerja yang telah disepakati.

Didalam Rencana Strategis pada dasarnya memuat unsur-unsur perencanaan diantaranya : *Tujuan Organisasi, Sasaran dan Arah Kebijakan, Strategi Program dan Kegiatan.*

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a) Tujuan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Adapun tujuan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. Meningkatkan keterampilan dan keahlian aparatur dalam menjalankan tugas untuk mencapai hasil kinerja yang maksimal.
3. Meningkatkan tertib administrasi perpajakan daerah;
4. Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
5. Mewujudkan sistem informasi manajemen laporan.
6. Mempermudah pengumpulan data.

b) Strategi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai salah satu unsur pelaksana daerah dibidang pendapatan melakukan Penegakan Hukum terhadap para pelanggar peraturan daerah tentang pajak daerah, serta dalam upaya meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan pajak daerah maka dilaksanakan Pengembangan system pembayaran Pajak Daerah sehingga terwujud program serta aplikasi system pembayaran, data tunggakan, perhitungan dan Ketetapan Pajak.

B. Rencana Kinerja Tahun 2019

Rencana Kinerja Tahun 2019 adalah sasaran dan atau target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2019. Rencana Kinerja Tahun 2019 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur mencakup Sasaran, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 dengan mengacu kepada Rencana Kerja (Renja) yang tentunya tahapan-tahapan dalam mewujudkan target kinerja jangka menengah

sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur, maka ditetapkan Program dan Kegiatan Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan didukung 16 Kegiatan, yaitu :
 - a. Penyediaan Jasa Surat – menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional;
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - e. Penyediaan Alat tulis Kantor;
 - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - g. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor;
 - h. Penyediaan peralatan rumah tangga;
 - i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang – Undangan;
 - j. Penyediaan makanan dan minuman Kantor;
 - k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 - l. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran;
 - m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
 - n. Penyediaan jasa pengamanan Kantor;
 - o. Penyediaan peralatan kebersihan Kantor;
 - p. Penyediaan Jasa Pengemudi.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, didukung 9 Kegiatan yaitu :
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

- c. Pengadaan Mebeulair;
 - d. Pengadaan Komputer;
 - e. Pengadaan Alat – alat Kantor;
 - f. Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi;
 - g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - h. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional;
 - i. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, di dukung 2 Kegiatan yaitu :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya;
 - b. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu.
 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, didukung 1 Kegiatan yaitu:
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, didukung 4 Kegiatan yaitu:
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;
 - c. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;
 - d. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
 6. Program Perencanaan dan Penganggaran, didukung 2 Kegiatan yaitu :
 - a. Penyusunan RENJA dan RENSTRA SOPD;
 - b. Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD.
 7. Program Peningkatan Pendapatan Daerah dengan didukung 10 Kegiatan, yaitu :
 - a. Pendataan dan Penilaian PBB-P2;
 - b. Pengelolaan Data dan Pencetakan SPPT dan DHKP PBB-P2;
 - c. Pendaftaran dan Verifikasi PBB-P2 dan BPHTB;

- d. Penertiban dan Penagihan Pajak Daerah;
- e. Pengawasan Dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
- f. Penatausahaan Piutang Pajak Daerah;
- g. Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah;
- h. Perhitungan, Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah;
- i. Penyelenggaraan Retribusi Daerah;
- j. Pelayanan Pajak Jago Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai stratejik yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam RKT merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan, yang meliputi masukan (*Input*), keluaran (*Output*) dan hasil (*Outcome*), berikut Rencana Capaian (Target Kinerja).

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Jangka Menengah

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	satuan	Kondisi awal	Target					Kondisi Akhir
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Daerah	Rp	166.759.295.107,00	166.759.295.107,00	186.293.621.326,00	191.363.499.633,00	212.699.849.596,00	233.969.834.556,00	991.086.100.218,00
		Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Retribusi Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Renstra Perubahan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021

Pada Tabel 2.1 dijabarkan tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu, Maka Badan Pengelolaan Pendapatan daerah Kabupaten Cianjur menetapkan sasaran serta indikator yang menjadi tolak ukurannya sebagai berikut:

- Sasaran : Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Indikator Sasaran :
- Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Daerah;
- Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Retribusi Daerah.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dokumen Perjanjian Kinerja digunakan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk memantau pencapaian kinerja dan menilai keberhasilan setiap organisasi perangkat daerah. Dokumen perjanjian kinerja mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program serta anggaran dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2019
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
1	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Dearah (PAD)	Persentase Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Daerah Terhadap Target Yang Ditetapkan	100%
		Persentase Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Retribusi Daerah Terhadap Target Yang Ditetapkan	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.501.673.355,00	PAD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	758.665.845,00	PAD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	65.000.000,00	PAD
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	36.835.000,00	PAD
5	Program Perencanaan dan Penganggaran	45.000.000,00	PAD
6	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	6.130.999.800,00	PAD
Jumlah		8.538.174.000,00	

D. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Berdasarkan anggaran belanja langsung persasaran strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	ANGGARAN		% ANGGARAN
			TARGET	REALISASI	
1	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Dearah (PAD)	Persentase Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Daerah Terhadap Target Yang Ditetapkan	5.668.264.800,00	5.599.601.600,00	98,79
		Persentase Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Retribusi Daerah Terhadap target Yang Ditetapkan	462.735.000,00	453.659.500,00	98,04

Dari tabel 2.3 dapat dilihat realisasi anggaran untuk pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah sampai dengan 31 Desember 2019 dari anggaran setelah perubahan direncanakan sebesar Rp. **5,668,264,800.00** terealisasi sebesar Rp. **5.599.601.600,00** atau **98,79%**. sedangkan realisasi anggaran untuk Pencapaian dari sektor Retribusi Daerah dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. **462,735,000.00** terealisasi sebesar Rp. **453.659.500,00** atau sebesar **98.04 %**.

E. Indikator Kinerja Utama

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tebal 2.4.

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TIPE PERHITUNGAN	RUMUS PERHITUNGAN		SUMBER DATA
Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Daerah Terhadap Target Yang Ditetapkan	%	Kumulatif	% Pencapaian Rencana Tingkat = Capaian	$\frac{\text{Realisasi Rencana}}{\text{Rencana}} \times 100\%$	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	Persentase Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Retribusi Daerah Terhadap target Yang Ditetapkan	%	Kumulatif	% Pencapaian Rencana Tingkat = Capaian	$\frac{\text{Realisasi Rencana}}{\text{Rencana}} \times 100\%$	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan Kinerja/ pemberi amanah.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Cianjur melaksanakan kewajiban dengan menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Cianjur yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memberikan gambaran mengenai penilaian tingkat pencapaian kinerja atas indikator Sasaran dan Program/kegiatan dan Penetapan Kinerja Tahun 2019, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kabupaten Cianjur, telah dilakukan beberapa analisis kinerja selengkapnya tertuang pada bab berikut ini.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019. Dokumen penetapan kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja karena telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2019, sehingga dapat menggambarkan kinerja Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia.

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu:

- (1) Data internal yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan harian, mingguan, bulanan, triwulanan dan laporan kegiatan lainnya;
- (2) Data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2019 yaitu:

- a) Indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Dalam tahun 2019 indikator input diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang dilakukan pengukuran kinerja dengan satuan rupiah;
- b) Indikator keluaran (*Output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik. Indikator Output yang digunakan bervariasi mulai dari output jumlah barang/jasa, dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya, dengan satuan kegiatan desa, buah, blok, paket, lembar, unit, rupiah dan sebagainya;
- c) Indikator Hasil (*Outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah(efek langsung), indikator ini menggunakan angka mutlak rupiah;

- d) Indikator Manfaat (*Benefit*) dan Dampak (*Impact*) yang berkaitan dengan kegiatan tahun anggaran 2019 tidak dilakukan pengukuran.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) baik dalam PKK maupun PPS memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\begin{array}{l} \text{\% Pencapaian} \\ \text{Rencana Tingkat} \\ \text{Capaian} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\begin{array}{l} \text{\% Pencapaian} \\ \text{Rencana Tingkat} \\ \text{Capaian} \end{array} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dalam formulir PKK dan kinerja sasaran dalam formulir PPS, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan

agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian Visi dan Misi, serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran dinilai dengan skala pengukuran ordinal yang dibuat dengan menggunakan asumsi pada table 3.1.

Tabel 3.1
Skala Ordinal

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Nilai 85 s/d 100	Baik
2	Nilai 70 s/d < 85	Cukup
3	Nilai 55 s/d < 70	Sedang
4	Nilai < 55	Kurang

Setelah evaluasi kinerja, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya, ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi melampaui target.

Analisis efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (outcomes). Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2019 yang mendukung kepada pencapaian visi dan misi Badan dapat disimpulkan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja

No	Indikator Sasaran	Capaian 2017 s/d 2019	Tahun 2019			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian 2017 s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Daerah	565.280.993.676,00	194.363.499.633,00	197.938.776.391,00	101,84	991.086.100.218,00	57,04%
2	Jumlah pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Daerah	83.618.525.996,00	41.188.066.061,00	34.468.350.983,00	83,69	-	-

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Daerah

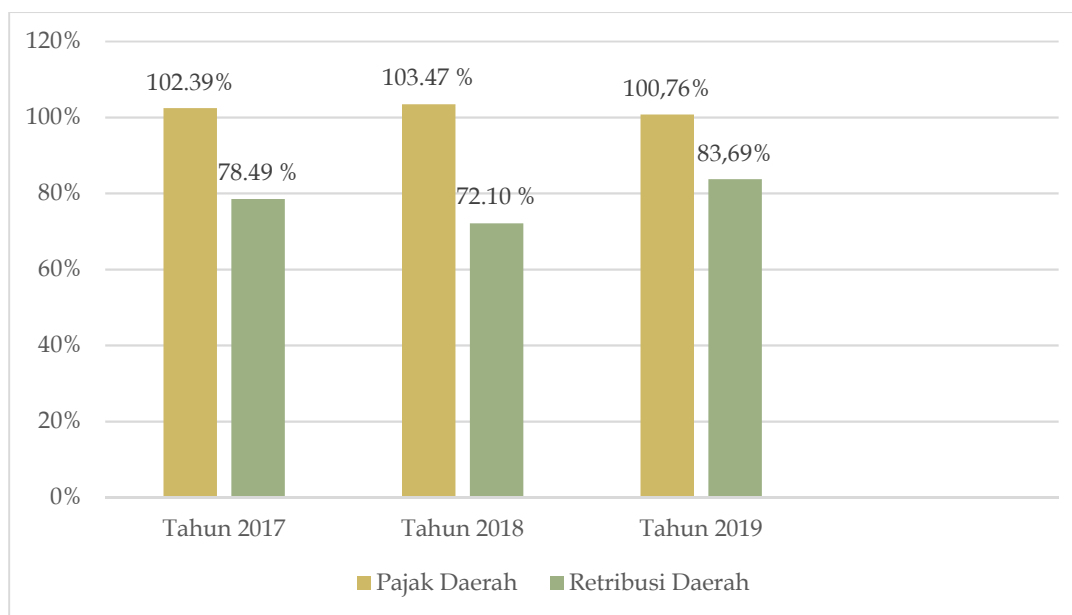
No	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir Renstra	Capaian tahun 2019 terhadap target akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Daerah	194.574.699.280,00	194.363.499.633,00	197.938.776.391,00	101,84	991.086.100.218,00	19,97%
	Pendapatan Asli Daerah	194.574.699.280,00	194.363.499.633,00	197.938.776.391,00	101,84	991.086.100.218,00	19,97%
A	PAJAK DAERAH	192.762.034.684,00	194.363.499.633,00	195.831.346.090,00	100,76	991.086.100.218,00	19,76%
1	Pajak Hotel	15.575.498.425,00	15.660.240.000,00	18.750.286.690,00	119,73	-	-
2	Pajak Restoran	12.804.834.828,00	15.083.690.000,00	16.770.542.015,00	111,18	-	-
3	Pajak Hiburan	1.712.600.461,00	1.675.200.000,00	1.905.606.929,00	113,75	-	-
4	Pajak Reklame	3.652.779.829,00	4.177.525.000,00	4.433.209.736,00	106,12	-	-
5	Pajak Penerangan Jalan	40.356.180.498,00	41.511.911.522,00	42.319.443.620,00	101,95	-	-
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.843.534.543,00	5.944.500.000,00	2.006.112.100,00	33,75	-	-
7	Pajak Parkir	568.346.128,00	2.092.140.000,00	655.423.136,00	31,33	-	-
8	Pajak Air Tanah	9.041.959.035,00	7.941.888.000,00	10.188.922.852,00	128,29	-	-
9	Pajak Sarang Burung Walet	19.531.000,00	18.480.000,00	18.646.000,00	100,90	-	-

10	Pajak BPHTB	56.700.841.925,00	49.491.141.240,00	43.038.455.376,00	86,96	-	-
11	Pajak PBB-P2	50.485.928.012,00	50.766.783.871,00	55.744.697.636,00	109,81	-	-
B	Penerimaan Lain Yang Sah						
1	Denda Pajak	105.757.055,00	-	187.433.800,00	-	-	-
2	B.Denda PBB	1.706.907.541,00	-	1.919.996.501,00	-	-	-

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Daerah

No	Indikator Sasaran	Capaian 2018	Tahun 2019			Target Akhir Renstra	Capaian tahun 2019 terhadap target akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Daerah	28,232,971,600,00	41.188.066.061,00	34.468.350.983,00	83,69	-	-
A	RETRIBUSI DAERAH	28,232,971,600.00	41.188.066.061,00	34.468.350.983,00	83,69	-	-
1	Dinas PUPR	570,639,900.00	588.440.200,00	597.826.600,00	101,60	-	-
2	Dinas Perhubungan	5,826,280,500.00	8.000.915.000,00	7.517.727.000,00	93,96	-	-
3	Dinas Lingkungan Hidup	867,055,600.00	1.561.166.145,00	1.189.742.000,00	76,21	-	-
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan	166,640,000.00	188.967.462,00	200.585.000,00	106,15	-	-
5	Satpol PP & Damkar	136,710,200.00	172.845.173,00	172.861.200,00	100,01	-	-
6	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Satu Pintu	10,722,247,900.00	16.904.924.107,00	12.770.596.502,00	75,54	-	-
7	Dinas Pertanian Perkebunan Pangan & Holtikultura	238,875,000.00	263.359.688,00	263.359.688,00	100,00	-	-
8	Dinas Pariwisata Pemuda & Olahraga	4,802,967,000.00	6.214.956.300,00	6.523.073.700,00	104,96	-	-
9	Dinas Kelautan Perikanan & Peternakan	536,246,500.00	688.826.000,00	599.193.000,00	86,99	-	-
10	Dinas Koperasi UKM Perindustrian & Perdagangan	3,960,187,000.00	6.333.718.000,00	4.385.683.200,00	69,24	-	-
11	BPKAD	405,122,000.00	269.947.986,00	247.703.093,00	91,76	-	-

Grafik 3.1
Perbandingan Persentase
Capaian Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2017 – 2019



Sumber : LKJIP Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur

Dari tabel 3.2 dapat dilihat Capaian dari sektor Pajak Daerah secara keseluruhan yaitu sebesar Rp. **197.938.776.391,00** dari target sebesar Rp. **194.363.499.633,00** atau sebesar 101.84%, dari sebelas Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 11 (sebelas) jenis objek pajak terdapat 3 (tiga) objek pajak yang tidak mencapai target, yaitu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak BPHTB.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan capaiannya hanya 33,75% tidak mencapai target karena menurunnya jumlah wajib pajak mineral bukan logam dikarenakan habis masa perijinannya sebanyak ± 25 wajib pajak dan pengurusan perpanjangan ijin operasional tambang di Dinas ESDM Provinsi memerlukan waktu yang lama sehingga pajaknya tidak dapat dipungut, maraknya tambang liar yang beroperasi tetapi tidak mempunyai ijin operasional yang tidak ditertibkan dan tidak dapat dipungut pajaknya. Sementara yang masih mengantongi ijin sebanyak ±12 wajib pajak yang dapat melaksanakan kewajiban ke pemerintah daerah.

Pajak parkir capaiannya hanya 31,33% tidak mencapai target dikarenakan adanya wajib pajak parkir potensial beralih menjadi wajib pajak retribusi parkir serta beberapa wajib pajak parkir hotel dan restoran membebaskan lahan parkirnya.

Pajak BPHTB Capaiannya hanya 86,96% tidak mencapai target karena pelaporan transaksi BPHTB dari sektor tersebut relatif kecil.

Namun demikian, terdapat 8 (delapan) jenis pajak daerah yang melampaui target yang telah ditetapkan, Pencapaian tersebut berkat kerja keras pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat maupun Wajib Pajak itu sendiri.

Untuk Retribusi Daerah terdiri dari berbagai jenis retribusi yang dikelola oleh beberapa Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing, Capaian dari sektor Retribusi Daerah secara keseluruhan yaitu sebesar Rp. **34.468.350.983,00** dari target sebesar Rp. **41.188.066.061,00** atau sebesar 83,69%, dengan melihat tabel 3.2 ada beberapa jenis retribusi daerah yang tidak mencapai target hal ini disebabkan ada kendala-kendala teknis dilapangan, adapun kendala-kendala dimaksud akan diuraikan pada segmen berikutnya.

Tabel 3.3
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang ≥ 100	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Berorientasi Pada Peningkatan Pemanfaatan Anggaran Secara Efisien, Pelayanan Prima Pada Masyarakat, Penyelenggaraan Secara Optimal Dengan Tersedianya SDM Aparatur yang Handal Dalam Pencapaian Dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Daerah	100,76	98,73	1,91
		Jumlah dokumen pendataan objek dan subjek PBB serta penilaian objek PBB	100	99,75	0,25
		Jumlah pendaftar baru PBB-P2	101,81	98,96	2,85
		Jumlah DHKP PBB yang dicetak	103,70	-	-
		Jumlah dokumen Data Piutang pajak daerah yang akuntabel	100	99,66	0,34
		Jumlah wajib pajak baru yang terdata	103,16	100	3,16
		Jumlah laporan penerimaan pendapatan Retribusi Daerah	100	98,04	1,96
		Jumlah wajib pajak yang ditertibkan dan ditagih	100,89	98,45	2,44
		Jumlah wajib pajak yang diawasi dan diperiksa	101,22	99,76	1,46
		Jumlah SKPD yang disampaikan pada wajib pajak	103,85	99,13	4,72
		Jumlah SPTPD dan surat teguran pengembalian SPTPD yang disampaikan pada wajib pajak	100,30	-	-
		Jumlah pelayanan pajak daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dikelola	100	90,75	9,25

B. Permasalahan dan Pemecahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan antara lain :

1. Pendaftaran dan pendataan Pajak Daerah

Pendaftaran dan pendataan Pajak Daerah merupakan kegiatan pelayanan 9 jenis pajak daerah (non PBB-P2 dan BPHTB) permasalahan yang timbul secara ekstensif yaitu masih banyaknya wajib pajak yang belum memiliki ijin usaha terutama di sektor pajak mineral bukan logam dan Pajak Air Tanah sehingga pajak daerahnya tidak bisa dipungut tetapi mereka tetap beroperasi. Secara intensifikasi permasalahan yang timbul yaitu letak geografis Kabupaten Cianjur yang luas mengakibatkan wajib pajak terutama daerah Cianjur selatan kurang patuh dalam melaporkan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD). Permasalahan

lain yaitu masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan daerah yang tepat waktu dan tepat jumlah, sehingga sangat berdampak pada realisasi capaian target pajak daerah yang telah ditetapkan.

Solusi :

Melakukan beberapa upaya optimalisasi petugas pemungut pajak daerah melalui penugasan ke daerah yang letak geografisnya jauh, melakukan koordinasi dengan Dinas terkait tentang ijin usaha. Solusi dari rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban, yaitu dengan dilaksanakannya proses pemungutan pajak daerah oleh fiskus melalui tahapan pendataan, pendaftaran, perhitungan pajak, pelaporan pajak, pembayaran dan penagihan pajak serta konsultasi dan sosialisasi kepada wajib pajak ditunjang pula dengan pemeliharaan dan pengadaan software hardware pengelolaan pajak daerah. diharapkan wajib pajak/pengelola pajak dapat mengetahui piutang pajak yang harus di selesaikan.

2. Penertiban dan Penagihan Pajak Daerah

Dalam hal penertiban pajak daerah permasalahan dilapangan sampai saat ini masih banyak wajib pajak yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah terutama dalam pemasangan reklame, sehingga harus ditertibkan ditambah sebagian reklame belum membayar pajak terlebih dahulu. Dalam hal penagihan pajak kendala yang muncul yaitu sumber daya manusia yang dimiliki kurang dibanding dengan jumlah wajib pajak yang harus ditagih, serta belum tersedianya perangkat juru sita.

Solusi :

Akan segera dibuatkan peraturan bupati tentang penagihan pajak daerah sehingga pelaksanaan sehingga pelaksanaan penagihan dan penertiban pajak daerah secara terus

menerus sehingga diharapkan ada efek jera bagi wajib pajak yang seenaknya memasang reklame tanpa proses pembayaran pajak terlebih dahulu. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah secara optimal.

Sehubungan dengan belum optimalnya sumber daya manusia pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah khususnya pada Bidang Penagihan karena belum memiliki perangkat juru sita maka solusinya yaitu dengan pembuatan berita acara perjanjian pembayaran tunggakan untuk wajib pajak yang menunggak.

3. Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah

Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah seharusnya sudah tidak perlu lagi dilaksanakan apabila wajib pajak telah patuh dalam pembayaran pajaknya, akan tetapi masih banyak wajib pajak yang belum menyerahkan dan melaporkan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) secara berkala dan juga pembayaran pajaknya masih jauh dibawah omset yang mereka peroleh setiap bulannya.

Solusi :

Karena hal itulah kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah tetap harus dilaksanakan secara rutin.

4. Penatausahaan Piutang Pajak Daerah

Piutang pajak daerah menjadi permasalahan tersendiri dimana jumlah piutang paling banyak ada di sektor pajak bumi dan bangunan (PBB). Sebagian besar karena pelimpahan dari kantor KP Pratama pada saat PBB harus diserahkan ke pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Nilai piutang PBB tidak disertai dengan data wajib pajak sehingga sulit untuk menagihnya.

Solusi :

Untuk menanggulangi piutang pajak dilakukan proses penghapusan pajak yang masa pajaknya sudah lebih dari 5

(lima) tahun kebelakang serta objek pajak yang sudah menjadi sarana/fasilitas umum serta dibuatkan suatu aplikasi untuk pengaduan pajak dari masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor BPPD cukup di Kecamatan masing-masing, dan pihak BPPD pun bisa cepat mengakses keluhan masyarakat dan menindaklanjutinya. Disamping itu diadakan pendataan ulang wajib pajak PBB di Kabupaten Cianjur secara bertahap sehingga muncul data yang valid tentang wajib pajak yang sesuai dengan yang ada di lapangan.

5. Pendaftaran dan Verifikasi PBB-P2 dan BPHTB

Beberapa permasalahan mengenai BPHTB antara lain :

1. Penurunan transaksi jual beli dan pemberian hak baru tanah untuk investasi bidang properti pada tahun 2019.
2. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang membebaskan pembayaran pajak BPHTB.
3. Keterlambatan pelantikan PPATS Kecamatan pada tahun 2019.

Solusi :

Melakukan koordinasi dengan PPAT/PPATS secara berkala sehingga Bappenda mendapatkan informasi terkait penerimaan BPHTB dan berkoordinasi dengan BPN terkait percepatan pelantikan PPATS.

6. Penyelenggaraan Retribusi Daerah

Untuk Retribusi Daerah terdiri dari berbagai jenis retribusi yang dikelola oleh beberapa Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing, Permasalahan dan Solusi pada pemungutan sektor Retribusi Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4

Kendala/Hambatan dan Solusi Pencapaian PAD Retribusi Tahun 2019

No.	NAMA OPD	KENDALA/HAMBATAN	SOLUSI	CAPAIAN (%)
1.	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN	<ol style="list-style-type: none"> Adanya pasar-pasar Alternatif. Masih adanya los kios Toko dan Ruko yang masih tutup. Masih terdapatnya para pedagang yang berjualan dilapak. 	<ol style="list-style-type: none"> Membuat surat himbauan, berupa peringatan kepada para pemilik kios/los untuk segera dipakai berjualan, agar membayar sesuai tarif yang telah ditetapkan. Melaksanakan penertiban para pedagang di luar pasar, dan digiring ke pasar induk Cianjur atau pasar yang telah disediakan bekerjasama dengan Satpol PP. Membuat surat pemberitahuan kepada parapedagang yang mempunyai beberapa kios/los untuk membayar retribusi sesuai HPK. 	69,24
2.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	<p>A. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN PENYEWAAN TANAH DAN BANGUNAN.</p> <ol style="list-style-type: none"> Penerapan Retribusi masih mengacu kepada DPA PUPR Tahun 2017. Kurangnya petugas pengungut Retribusi. Sarana dan prasarana serta kelengkapan atau peralatan oprasional yang ada masih sangat terbatas. Kurangnya informasi dan sosialisasi tentang pemakaian kekayaan daerah / penyewaan tanah dan bangunan dikalangan masyarakat. Adanya perbaikan trotoar dan banyaknya jalan masuk yang ditutup. <p>B. RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)</p> <ol style="list-style-type: none"> Revisi Perda RTRW belum selesai sehingga kepastian minat investasi belum meningkat Penentuan target tidak mengacu kepada potensi real yang ada di wilayah Kab.Cianjur. Sarana dan prasana serta kelengkapan atau peralatan oprasional yang ada masi sangat terbatas. Data base bangunan-bangunan yang belum berIMB belum ada, demikian juga system pelayanan IMB masih menggunakan system manual. Kurangnya informasi dan sosialisasi tentang IMB dikalangan masyarakat sehingga menyebabkan rendahnya tingkat pengetahuan akan arti penting dan manfaatnya memiliki IMB. Faktor lingkungan menyebabkan perilaku masyarakat menjadi malas untuk membayar Retribusi IMB. Peraturan perundang-undangan IMB yang tidak tegas sehingga masih terjadi penghindaran terhadap kewajiban untuk membayar Retribusi IMB Adanya wacana peraturan perundang-undangan yang baru yaitu Omnibus Law yang akan menghapus IMB dari daftar perijinan tertentu. <p>C. RETIBUSI PEMBERIAN IJIN TRAYEK KEPADA</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pengurangan target Retribusi Menambah petugas pengungut Retribusi Melengkapi sarana dan prasana serta peralatan oprasional. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Menunggu penetapan Perda RTRW. Pengurangan targer Retribusi. Melengkapi sarana dan prasarana serta peralatan oprasional. Membuat data base bangunan yang belum mempunyai IMB. Melaksanakan sosialisasi kepda masyarakat. Membuar peraturan perundang-undangan IMB yang lebih tegas. 	75,54

		<p>ORANG PRIBADI. Penetapan Retribusi masih mencakup kartu pengawasan (1 tahun) sekali padahal sesuai Perbub No.32 Tahun 2018 Tentang tarif Retribusi ljin Trayek bahwa kartu pengawasan itu sudah tidak lagi harus membayar Retribusi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan jumlah nilai (4000 unit kendaraan x Rp.60.000 = Rp.240.000) 2. Saat ini DPMTSP harus menerbitkan SK Perpanjangan Trayek dengan nilai Retribusi sebesar Rp.150.000/ 5 tahun. 3. Jumlah Retribusi tahun 2019 mencapai (497 unit x Rp.150.000 = Rp. 74.550.000). <p>D. RETRIBUSI PEMBERIAN PERPANJANGAN IMTA KEPADA PEMBERI KERJA TENAGA ASING.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat penjabatan / tidak memperpanjang IMTA sebanyak 26 orang. 2. Terdapat bebrapa TKA yang masa kerjanya sudah mempunyai 4 tahun sehingga perpanjangan IMTA tahun berikutnya, pembayaran Retribusinya setor ke pusat atau kementerian tenaga kerja. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurangan target Retribusi sesuai dengan realita para wajib bayar. 2. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh komponen pemangku kebijakan penetapan Retribusi. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurangan target Retribusi sesuai dengan realita wajib bayar. 2. Mengadakan kerja sama pelaksanaan pengawasan TKA dengan Disnakertrans. 	
3.	DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	<p>Retrebusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI / PPI) , Retrebusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong dan Retrebusi Penjualan Usaha Daerah adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana PPI yatu jasa perbengkelan belum ada yang mengelola Jasa tambat labuh karena di PPI Jayanti nelayannya termasuk katagori nelayan tradisional. 2. Sarana dan prasarana PPI banyak mengalami kerusakan (pompa air, jaringan listrik) yang berpengaruh terhadap ketersediaan suplay air terutama untuk mess, lapak ikan kios makanana dan wc umum (sumber PAD) terutama saat liburan hari raya lebaran. 3. Masih ada pengguna mess dan aula yang tdk membayar sesuai ketentuan serta banyak dibangun sarana sejenis di luar PPI milik masyarakat (perorangan). 4. Musim panen sangat berpengaruh terhadap pembayaran retribusi yang dibebanka kepada pengguna/pemanfaat terutama jasa sewa bangunan yang berhubungan langsung dengan ikan hasil tangkapan (gudang mesin gudang pengepakan dan retribusi ikan). 5. Sarana dan prasarana yang ada sebagian sudah dalam kondisi kurang layak pakai. 6. Kunjungan orang ke PPI Fluktuatif. 7. Pengunjung yang datang melalui pintu masuk berkurang karena ada pintu masuk yang dikuasai oleh LSM/ormas tertentu, ada nya pengalihan tujuan pengunjung ke tempat wisata lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. LSM /Ormas tertentu yang menguasai atau membuka pintu masuk yang lain harus ditindak tegas oleh aparat. 2. Memperbaiki sarana prasarana yang rusak. 3. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang PPI Jayanti. 	86,99
4.	DINAS PERHUBUNGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir didaerah obyek wisata tidak dilaksanakan di gerbang kawasan wisata cibodas dan beralih ke zona parkir yang telah ditentukan . Akan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemungutan rtribusi di obyek wisata cibodas sebaiinya dilakukan seperti semula, yaitu di pintu masuk area cibodas. 	93,96

		<p>tetapi kendaraan pengunjung tidak parkir pada zona parkir langsung parkir dimasing-masing kawasan (lipi, tngp dan area golf cibodas).</p> <ol style="list-style-type: none"> Masih banyak kendaraan umum yang belum merubah nama kepemilikan kendaraan menjadi badan hukum sehingga kendaran tersebut tidak dapat melaksanakan uji berkala kendarannya. Adanya kendaraan yang tidak melaksanakan uji berkala dikarenakan kendaraan tersebut tidak beroperasi, karena adanya persaingan usaha antar po bis yang memiliki jenis dan type tahun lama dan jenis dan type tahun terbaru, sehingga pemilik bis type dan jenis lama enggan untuk memperpanjang uji berkala kendaraan. Banyak pemilik kendaraan mobil barang yang berdomissili di wilayah cianjur selatan dan barat yang mempunyai jarak yang jauh menuju kantor dinas. 	<ol style="list-style-type: none"> Pemilik angkutan penumpang umum diimbau untuk segera merubah kepemilikan menjadi badan hukum. Perlu adanya pengujian keliling ke wilayah selatan dan barat agar para pemilik kendaraan dapat terlayani untuk melaksanakan Pengujian Berkala Ulangan. Perlu adanya Pengujian Kendaraan Keliling Ke Wilayah Selatan dan Barat agar para pemilik kendaraan dapat terlayani untuk melaksanakan Pengujian Berkala Ulangan. 	
5.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP & KEBERSIHAN	<ol style="list-style-type: none"> Pemungutan retribusi khusus untuk pedagang kaki lima terdapat kendala dari para pedagang yang mengeluhkan waktu dan tempat dagang yang dibatasi oleh pihak Sat Pol PP sehingga waktu untuk penagihan retribusi kurang optimal. Retribusi untuk kategori rumah tinggal yang semula dipungut di loket-loket PDAM mulai bulan agustus 2018 sudah tidak bisa lagi dipungut dikarenakan loket-loket PDAM nya sudah tutup dengan adanya pembayaran sistem online. Retribusi kebersihan persampahan yang seharusnya dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur pada kenyataannya banyak yang telah diambil alih pemungutannya oleh pihak Kelurahan, RW, RT, Karangtaruna dll, dan tidak melakukan penyetoran retribusi ke kas daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 07 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pelayanan Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus, nilai retribusi didalamnya sampai saat ini belum dilakukan perubahan/penyesuaian sesuai dengan target yang ditetapkan. Masih kurangnya kesadaran masyarakat/Wajib Retribusi terhadap kewajibannya membayar retribusi ke Kas Daerah sebagai PAD. Masih adanya petugas DLH yang melakukan pemungutan retribusi secara illegal/tidak disetorkan ke kas daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> Dengan adanya PAD retribusi yang ada pada Dinas LH Kabupaten Cianjur dan kami harapkan BPPD dapat turut serta menjadi anggota Tim OPD penghasil dalam verifikasi, evaluasi dan win win solution pencapaian target PAD tahun berikutnya. Melakukan koordinasi dengan Sat Pol PP berkenaan dengan waktu dan tempat untuk para PKL yang diperbolehkan berjualan. Berkoordinasi dengan Camat perihal retribusi dari rumah tangga yang pemungutannya telah dilakukan oleh Kelurahan, RT/RW, Karangtaruna dll, untk dilakukan pembagian hasil retribusi agar sebagian dapat masuk ke kas daerah. Kami telah mengajukan Rancangan Peraturan Bupati Perubahan Nilai Retribusi Kebersihan ke Bagian Hukum Setda. Membentuk tim untuk melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap seluruh wajib retribusi sekaligus sosialisasi untuk nilai retribusi baru; 	76,21
6.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)	<p>Terjadinya pengunduran diri atas PT. Eminence Hospitality Services yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur sehingga terjadinya penurunan target yang telah ditentukan.</p>	<p>Melaksanakan pendataan atas pemanfaatan barang milik daerah yang ada di wilayah pemerintah Kabupaten Cianjur yang berpotensi untuk lebih meningkatkan PAD.</p>	91,76

C. Realisasi Anggaran

Tabel 3.5 Realisasi Kinerja dan Anggaran

Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program	Keuangan		
		Target	Realisasi	Capaian %		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Berorientasi Pada Peningkatan Pemanfaatan Anggaran Secara Efisien, Pelayanan Prima Pada Masyarakat, Penyelenggaraan Secara Optimal Dengan Tersedianya SDM Aparatur yang Handal Dalam Pencapaian Dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang	Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Daerah	194.363.499.633,00	195.831.346.090,00	100,76	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	6.130.999.600,00	6.053.261.100,00	98,73
	Jumlah dokumen pendataan objek dan subjek PBB serta penilaian objek PBB	2 Dokumen	2 Dokumen	100	Pendataan dan Penilaian PBB	1.039.599.000,00	1.037.009.000,00	99,75
	Jumlah pendaftar baru PBB-P2	551 Transaksi	561 Transaksi	101,81	Pendaftaran dan Verifikasi PBB-P2 dan BPHTB	799.746.000,00	791.423.000,00	98,96
	Jumlah transaksi BPHTB	13.600 Transaksi	11.987 Transaksi	88,14				
	Jumlah SPPT PBB yang dicetak	1.127.762 SPPT	1.115.329 SPPT	98,90	Pengolahan Data dan Pencetakan SPPT dan DHKP PBB-P2	704.660.000,00	699.425.000,00	99,26
	Jumlah DHKP PBB yang dicetak	2.056 DHKP	2.132 DHKP	103,70				
	Jumlah dokumen Data Piutang pajak daerah yang akuntabel	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Penatausahaan Piutang Pajak Daerah	444.935.000,00	443.435.000,00	99,66
	Jumlah wajib pajak baru yang terdata	285 wajib pajak	294 wajib pajak	103,16	Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah	452.628.600,00	452.628.600,00	100
	Jumlah laporan penerimaan pendapatan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Penyelenggara Retribusi Daerah	462.735.000,00	453.659.500,00	98,04

Berorientasi Pada Peningkatan Pemanfaatan Anggaran Secara Efisien, Pelayanan Prima Pada Masyarakat, Penyelenggaraan Secara Optimal Dengan Tersedianya SDM Aparatur yang Handal Dalam Pencapaian Dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah karcis Retribusi Daerah yang dicetak	48.600 blok	48.600 blok	100				
	Jumlah dokumen evaluasi dan pengawasan terhadap penarikan setoran karcis retribusi	1 dokumen	1 dokumen	100				
	Jumlah wajib pajak yang ditertibkan dan ditagih	2.481 wajib pajak	2.503 wajib pajak	100,89	Penertiban dan Penagihan Pajak daerah	727.740.000,00	716.455.000,00	98,45
	Jumlah wajib pajak yang diawasi dan diperiksa	4.410 wajib pajak	4.464 wajib pajak	100,32	Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	554.307.200,00	552.984.400,00	99,76
	Jumlah SKPD yang disampaikan pada wajib pajak	7.108 Wajib pajak	7.382 Wajib pajak	103,85	Perhitungan, Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah	584.809.000,00	579.704.100,00	99,13
	Jumlah SPTPD dan surat teguran pengembalian SPTPD yang disampaikan pada wajib pajak	995 wajib pajak	998 wajib pajak	100,30				
	Jumlah pengadaan alat perekam objek pajak pelayanan pajak daerah berbasis teknologi, informasi dan komunikasi	2 Jenis	2 Jenis	100	Pelayanan Pajak Jago Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	359.840.000,00	326.537.500,00	90,75

Dari tabel 3.5 dapat diketahui bahwa persentase realisasi anggaran yang terserap pada tahun 2019 program wajib adalah sebagai berikut:

1. Pendataan dan Penilaian PBB-P2 (99,75%).
2. Pengolahan Data dan Pencetakan SPPT dan DHKP PBB-P2 (99,26%).
3. Pendaftaran dan Verifikasi PBB-P2 dan BPHTB (98,96%).
4. Penatausahaan Piutang Pajak Daerah (99,66%).
5. Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah (100%).
6. Penyelenggaraan Retribusi Daerah (98,04%).
7. Penertiban dan Penagihan Pajak Daerah (98,45%).
8. Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (99,76%).
9. Perhitungan, Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah (99,13%).
10. Pelayanan Pajak Jago Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (90,75%).

Kegiatan wajib atau kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja dari target anggaran yang disediakan yaitu sebesar Rp.6.130.999.800,00 dan terealisasi Rp.6.053.261.100,00 atau 98,73% anggaran yang terserap. Sisa anggaran 1,27% merupakan efisiensi anggaran dari GU maupun LS/kontrak hasil negosiasi Belanja Barang dan Jasa.

D. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran dan realisasi Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2018 dapat dilihat pada table 3.6.

Tabel 3.6
Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian (%)
1	Belanja	21.575.405.538,33	19.973.816.609,00	92,58
	a. Belanja Tidak Langsung	13.037.231.538,33	11.658.398.577,00	89,42
	b. Belanja Langsung	8.538.174.000,00	8.315.418.032,00	97,39

Dari tabel 3.6 dapat diketahui bahwa Belanja Daerah capaiannya 92,58% dari anggaran yang direncanakan setelah perubahan, yaitu sebesar Rp. 21.575.405.538,33 terealisasi Rp. 19.973.816.609,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 13.037.231.538,33 realisasinya Rp.11.658.398.577,00 atau 89,42% meliputi gaji dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan PNS dan insentif dari PAD. Pencapaian Belanja Tidak Langsung yang hanya tercapai 89,42% dari target, anggaran yang tidak terserap sebagian besar merupakan insentif pendapatan asli daerah dari beberapa jenis pajak yang tidak dapat dicairkan, hal tersebut dikarenakan capaiannya tidak sesuai dengan tahapan target sesuai Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan total Belanja Langsung sebesar Rp.8.538.174.000,00 terealisasi sebesar Rp.8.315.418.032,00 atau 97,39% meliputi belanja non urusan dan belanja urusan wajib.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2018 yang dapat disusun sebagai salah satu upaya mewujudkan reformasi birokrasi yang menggambarkan transparansi dan akuntabilitas kinerja, selanjutnya laporan ini disajikan untuk pihak lain yang berkepentingan untuk dijadikan bahan evaluasi.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian seluruh sasaran, secara umum Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur telah mencapai nilai dalam kisaran $\geq 85 - 100\%$ yang termasuk dalam interpretasi baik. Dalam tahun anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai melalui anggaran APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2019 sebesar Rp 8.538.174.000,00 dan realisasi anggaran mencapai Rp. 8.315.418.032,00 atau dengan serapan anggaran mencapai 97,39%.

Secara umum tujuan, program ataupun sasaran Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur telah berjalan dengan baik meskipun masih ditemui sejumlah hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Hasil yang telah dicapai di tahun 2019 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi ditahun-tahun mendatang. Adapun keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atau sasaran yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan yang tentunya membawa dampak kepada peningkatan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dengan menyadari adanya berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya tentu diupayakan pemecahan masalah antara lain:

1. Mengadakan pengkajian dan penelitian yang kaitannya dengan potensi Pendapatan Pajak Daerah.
2. Mengintensifkan Potensi Pajak Daerah yang ada melalui :
 - a) Penggalian potensi Pendapatan Pajak Daerah yang dimungkinkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Pendapatan Pajak Daerah.
 - b) Penyesuaian sistem pengelolaan anggaran sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan pola peningkatan kerjasama Pemerintah, swasta dan masyarakat.
3. Pemenuhan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan pelayanan internal dan eksternal dengan penetapan system pelayanan minimal.

Kemudian atas berbagai perhatian dan fasilitas dalam rangka penyusunan ini disampaikan banyak terimakasih, kami menyadari laporan ini jauh dari pada sempurna, untuk itu kami mohon masukan yang konstruktif agar dimasa yang akan datang jauh lebih baik.

Cianjur, 12 Februari 2020
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah,
Kabupaten Cianjur,

KOMARUDIN, S.Sos, M.Si
NIP. 19720415 199303 1 008